

## KONSEP DASAR DEMOKRASI DALAM POLA PENDIDIKAN DI AKADEMI KEPOLISIAN

Waspiah<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Pendidikan dalam perspektif demokrasi mempunyai peran penting dan strategis dalam pembentukan karakter dan watak kebangsaan. Oleh karena itu pembentukan karakter-watak perwira polisi yang demokratis harus melalui pola pendidikan yang demokratis juga. Melakukan pola pendidikan yang demokratis bisa merefleksi dari sekolah demokrasi yang harus secara riil dilakukan di lembaga pendidikan. Melalui analisis kritis secara substansi nilai demokratis dalam sekolah demokrasi sudah dijalankan oleh pola pendidikan di Akpol melalui pengajaran/pendidikan, pelatihan dan pengasuhan. Namun demikian perlu ada penekanan lebih konkrit dalam mengoperasionalkan sehingga civitas akademika terutama dosen, gadik dan atau pengasuh harus mengembangkan filosofis pendidikan demokratis dengan wawasan global dan berperilaku mendidik yang berbasis pada kearifan nilai lokal. Nilai ini yang secara inheren akan diidentifikasi oleh peserta didik yaitu calon perwira polisi, sudah pasti akan lebih demokratis dalam menjalankan tugas mulia sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan penegak hukum.

Kata kunci: demokrasi, pola pendidikan, Akademi Kepolisian

### A. PENDAHULUAN

Konteks Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah komponen yang Penting dan strategis. Membangun demokrasi, artinya proses pendidikan harus mampu menjadikan warga negara yang merdeka,

berpikir kritis dan sangat familiar dalam praktik-praktik demokrasi sekaligus mampu menyelesaikan masalah dasar secara cerdas. Sejarah mencatat, seringkali intelektual-intelektual bangsa yang berpendidikan “barat” lah yang memegang

<sup>1</sup> Waspiah, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

peranan penting sebagai penggas jiwa dan ide kebangsaan dan sekaligus sebagai *founding fathers* berdirinya republik ini. Namun tak kurang pula, pendidikan yang telah dikenyam pemimpin bangsa, ketika berubah menjadi suatu rejim yang otoriter maka pendidikan yang diberikan oleh pemerintah (baca: penguasa) menuntut penerimaan masyarakat secara paksa (*passive acceptance*). Masa otonomi daerah ditandai dengan implementasi UU No.22 tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kedua UU inilah perspektif demokratisasi pendidikan memiliki fondasi dasarnya sebelum diterbitkan peraturan-peraturan (PP) maupun Peraturan daerah (Perda) yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan ini, selain UU Sisdiknas itu sendiri.

Terkait dengan pembentukan watak dan karakter Pemimpin terutama Perwira Polisi yang berkarakter dengan waktak kebangsaan menuntut proses pendidikan yang ideal. Alasannya adalah Perwira Polisi mempunyai ruang lingkup tanggung jawab dan tugas yang kompleks sekaligus krusial dalam melakukan pelayanan, pengayo-

man, perlindungan dan penegakkan hukum.

Berbagai literatur dalam dan luar negeri, yang kuno maupun yang mutakhir, yang tradisional maupun modern, yang sederhana maupun yang canggih, mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus selalu memiliki kelebihan dan keunggulan dari pada rakyatnya. Berikut ini petikan pendapat para pakar negara kepemimpinan :“ Pemimpin adalah pengaruh “. John Maxwell deskripsi satu kata, singkat dan sederhana, yang menempatkan kepemimpinan dalam jangkauan setiap orang. Kepemimpinan bukan jabatan, posisi, atau bagan alir (*Flowchart*). Kepemimpinan adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain.“ Karakter adalah kekuasaan “. Booker T. Washington, yang harus dipelajari dalam pelajaran pertama adalah kepemimpinan berwawasan luas dibangun dari karakter yang hakiki. Infrastruktur karakter yang baik sangat penting untuk mendukung tingkah laku (*behavior*) yang baik. Kepercayaan dan keterlibatan pengikut akan parallel dengan level karakter kita (pemimpin).“ Karakter adalah hasil pembiasaan dari sebuah gagasan dan perbuatan, Stephen R.

Covey: "Gunakan kekuasaan untuk membantu orang". Pemberian kekuasaan tidak untuk meraih tujuan pribadi, atau membuat pertunjukan terbesar di dunia, dan bukan untuk mendapatkan nama. Hanya ada satu kegunaan kekuasaan yakni membantu orang.

Pertanyaan empirik dan ilmiah adalah bagaimana idealnya proses pendidikan yang mencetak perwira polisi berkarakter-berwatak kebangsaan yang berwawasan global berperilaku berdasarkan pada kearifan nilai lokal. Artikel ini akan mengaitkan proses pendidikan ideal pada sekolah demokrasi dengan pengintegrasian kurikulum ideal Akademi Kepolisian yang akan menghasilkan para Perwira Remaja Polri.

## B. KONSEP DEMOKRASI

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan atau *kratein* yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai "Rakyat berkuasa". Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Dengan

demikian dalam suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat sebagaimana pengertian demokrasi yang diucapkan oleh Abraham Lincoln "*the goverment from the people, by the people and for the people*" (suatu pemerinthan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat).

Jadi demokrasi berarti kekuasaan berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa sekaligus diperintah pemerintahan dalam Negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara serta mempertanggung jawabkan pada rakyat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Dewasa ini, bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dalam demokrasi tidak langsung, para pejabat membuat UU dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama

rakyat. Hak – hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi, karena pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat.

Pada awalnya di era Yunani kuno abad ke 6-3 SM dilaksanakan demokrasi dengan sistem demokrasi langsung yaitu suatu bentuk proses pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sistem demokrasi langsung ini efektif dan sederhana pada wilayah terbatas, jumlah penduduknya sedikit dan bahkan tidak semua warga Negara mempunyai hak untuk ikut menentukan keputusan – keputusan politik.

Tokoh tokoh terkenal dalam konteks demokrasi adalah John Locke dan Montesquie (1689–1755) dari Prancis dengan gagasan *Trias politika* yang membagi kekuasaan membuat UU (legislatif), melaksanakan UU (eksekutif) dan mengadili (yudikatif). Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan sistem politik pada akhir abad pertengahan yang merupakan wujud pemikiran akan adanya hak-hak politik rakyat agar ada jaminan hak-hak politik rakyat tersebut berjalan lebih efektif, munculah gagasan

untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang melalui kontitusi baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis (konvensi) gagasan ini disebut sebagai kontitualisme.

Gagasan ini dikenal sebagai Negara konstitusional (*constitutional state*) atau dalam pembahasan UUD 1945 disebut sebagai *Rechtstaat* atau Negara Hukum. Menurut Stahl ada empat unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti klasik, yaitu adanya (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu; (3) pemerintahan berdasarkan aturan atau UU; dan (4) peradilan administrasi.

Dari praktik demokrasi abad ke-19 yang menekankan pada paham *liberalism* dan akses-aksesnya mengubah pikiran para ahli menandai wajah baru *constitutional* abad ke-20.

### C. TEORI DEMOKRASI

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, *Formal democratif* dan yang kedua, *substance democracy* yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan (Wina-taputra 2006). Demokrasi dalam

pelaksanaan sistem pemerintahan ada dua yaitu pertama, sistem presidensial artinya sistem yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung dari rakyat. Sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) dan kenegaraan atau kekuasaan negara sepenuhnya berada ditangan presiden. Kedua sistem parlementer yaitu sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan *legislative*. Kepala eksekutif (*head of government*) adalah berada ditangan seseorang perdana menteri sedangkan kekuasaan eksekutif ditangan presiden.

### 1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi

Menurut Held (2004:10) demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan.

Namun demikian perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara.

### 2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara komunis seperti Rusia, China, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara, maka digagaslah demokrasi komunis.

Dalam hubungan ini Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi "*commune structure*" (struktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Oleh karena itu, menurut komunis, negara *post* kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal, yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi

tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.

Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis.

Ada dua pendekatan terhadap demokrasi: pendekatan normatif dan pendekatan empirik (Baechler 1995:7; Gaffar 1999:11). Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, ide kedaulatan rakyat secara utuh sulit diterapkan selain beragam dan seringkali saling bertentangan, rakyat juga sulit dihimpun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itulah muncul ide demokrasi yang terkonkretisasi dalam lembaga perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang anggota-anggotanya dipilih dari partai politik atau perseorangan sebagai agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai rangka-

ian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan dan meminta pertanggungjawaban wakilnya di lembaga perwakilan. Wakil-wakil inilah yang kemudian membuat dan menjalankan keputusan publik.

Anders Uhlin mengemukakan adanya dua pendekatan berbeda terhadap konsep demokrasi, yaitu sebagai *tujuan* dan sebagai *label bagi sistem politik yang ada*. Teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep tentang bagaimana demokrasi seharusnya), sementara teori empiris berkenaan dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang) (Suhud 1988:33). Sedangkan Franz Magnis Suseno dalam menelaah mengenai pengertian dasar demokrasi, membedakan antara apa yang disebutnya dengan "telaah etika politik" di satu pihak dan "diskursus politik" di lain pihak. Menurutnya "diskursus politik" dapat diartikan sebagai mengajukan penilaian, kritik, dan tuntutan langsung terhadap realitas politik yang bertujuan menilai, mempengaruhi, mempertahankan atau mengubah keadaan dalam negara serta menanggapi langsung argumentasi dan legitimasi yang diajukan oleh

pelbagai aktor di panggung politik. Sedangkan telaah “etika politik” termasuk telaah filsafat yang obyeknya adalah prinsip-prinsip sebagai dasar untuk dapat mempertanyakan syarat, konsistensi dan implikasi-implikasi pertanyaan diskursus politik dari segi prinsip etika.

Terkait dengan demokrasi dari segi etika politik, negara demokratis memiliki lima ciri hakiki, yaitu: negara hukum; prinsip kontrol nyata masyarakat terhadap pemerintah; prinsip perwakilan melalui lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang bebas; prinsip mayoritas; dan adanya prinsip jaminan terhadap hak-hak demokratis (Suseno 1997:87-92; 2003:281-290). Sedangkan negara demokratis terkait dengan diskursus politik memiliki lima macam elemen, yaitu: partisipasi, di mana rakyat terlibat dalam pembuatan keputusan politik; adanya kontestasi yang menyamakan kedudukan di antara rakyat; adanya tingkat liberasi dan kebebasan yang dijamin untuk atau oleh rakyat; adanya sistem perwakilan; dan satu sistem pemilihan berdasarkan aturan mayoritas (Sargent 1984:32-33).

Menurut Beetham normativitas demokrasi bertujuan untuk

memberi ruang kontrol rakyat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warganegara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi dan bertanggungjawab secara transparan (Beetham 1999:12). Dalam suatu pemerintahan, prinsip-prinsip di atas mensyaratkan seperangkat instrumen, meliputi: (1) pemilu yang demokratis, keterwakilan, pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab; (2) konstitusi atau hukum yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan; dan (3) partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, baik media, seni, maupun organisasi masyarakat sipil yang bebas dan berorientasi demokratis. Prasyarat efektifnya suatu sistem demokrasi adalah independensi atau kemandirian dan korespondensi atau kesesuaian antara definisi resmi *demos* (yakni bagaimana “warganegara Indonesia” didefinisikan secara legal-konstitusional dan administratif) yakni dengan bagaimana masyarakat mengidentifikasi diri mereka dalam urusan public dalam arti *kratos*. Hal inilah yang pada akhirnya mengacu pada

responsifitas representasi (Beethan 2002:37-39).

Demokrasi normatif sebagai sebuah ide pemerintahan rakyat memposisikan rakyat dalam posisi sentral untuk menentukan dan menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dipahamai Rousseau sebagai kemauan rakyat (*volonte generale* atau *general will*) yang dilembagakan melalui lembaga perwakilan rakyat agar dapat dirumuskan dalam *public policy*. Atas dasar tersebut maka lahirlah teori demokrasi representatif, di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang dalam lembaga parlemen (legislatif) yang dipilih rakyat melalui pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang diimbangi dengan lembaga pemerintah (eksekutif) sebagai pelaksana kebijakan parlemen dan lembaga-lembaga hukum (yudikatif). Sedangkan dari sudut empiris, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang di-

dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Deliar Noer 1983:207).

Terkait dengan hal tersebut, April Carter maupun Lawrence Dood (Carter 1985:70; Doot 1976:16) menyatakan bahwa dalam teori demokrasi (*representative democratic theory*), institusi perwakilannya meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembuatan hukum (*legislator*) untuk menjalankan kehendak rakyat yang terinterpretasikan dalam UUD (*supreme legislative body of some nations*) dan UU lazim disebut dengan parlemen terkait dengan fungsinya dalam melakukan pengawasan (*control*) terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan UUD dan UU yang ditetapkan. Guna mengefektifkan fungsi pengawasan inilah, parlemen mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak bertanya. Lembaga eksekutif adalah institusi pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibuat oleh legislatif, baik dalam model *parlementer system*, *presidensial system*, *hybrid system*

maupun *collegial system*. Lembaga eksekutif berfungsi untuk memilih dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menentukan arah simbolis yang jelas dan menjamin agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Sedangkan lembaga yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi yudisial sesuai dengan prinsip '*independent of judiciary*' diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.

#### D. PENGERTIAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Winataputra, Udin. 2006 : 12) Demokrasi memang tidak diwarisi atau diwariskan, tetapi harus diketahui, dipahami, ditangkap dan dicerna serta diamalkan melalui proses belajar sehingga diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (disekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan di luar sekolah dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) *cultural* untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks (Winaputra 2006:19). Sistem pemerintahan demokrasi selalu dicitakan oleh negara-negara di dunia. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses mengimplementasikan demokrasi membutuhkan kesadaran, kerja keras dan semangat yang luar biasa dari semua komponen negara. Hal inipun harus dikonkritkan dalam sistem politik kehidupan bernegara dan berbangsa.

Demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengaju pada ciri-ciri sebagai berikut:

1. Proses yang tak pernah selesai, dalam arti bertahap, berkesinambungan terus-menerus.
2. Bersifat evolusioner dalam arti dilakukan secara berlahan.
3. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan ( anarkis)

4. Berjalan melalui cara musyawarah; dalam arti perbedaan yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah.
5. Jadi, budaya demokrasi di masyarakat akan terbentuk bilamana nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan prilaku hidup pada hakikatnya budaya demokrasi akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

#### **E. SEKOLAH DEMOKRASI**

Perjalanan pendidikan nasional yang panjang mencapai suatu masa yang demokratis dan sekaligus kenyataan yang mengarah pada pendidikan yang cenderung mengarah pada demokrasi liberal. Yaitu ketika pada saat ini otonomisasi pendidikan melalui berbagai instrumen kebijakan mengarah pada keniscayaan kebebasan yang tidak beres sumber pada realitas lokal sehingga melahirkan kebebasan yang tidak mengakar. Coba dikritisi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "privatisasi" perguruan tinggi negeri –dengan status baru yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui PP No. 60 tahun 2000, sampai UU No.32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur konsep, sistem dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah. Konteks peraturan tersebut juga menunjukkan pada pola pendidikan yang berusaha dikembalikan untuk melahirkan insan-insan akademis dan intelektual yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis, bukan menghancurkan bangsa dengan budaya-budaya korupsi kolusi dan nepotisme, dimana peran pendidikan (agama, moral dan kenegaraan) yang didapat dibangku sekolah dengan tidak semestinya.

Dalam kondisi yang demikian, mungkin benar ungkapan yang mengatakan "negeri ini dihancurkan oleh kaum intelektualnya sendiri". Apa sebab, karena pendidikan nasional selama ini bertekuk lutut kepada kepentingan penguasa. Pendidik, yaitu guru dan dosen yang tidak mengikuti sistem akan terlibas, sehingga murid yang kelak akan menjadi pemimpin negeri ini mendapatkan pendidikan yang tidak

bermutu. Pendidikan disequilibrium antara pendidikan moral dan agama dengan sains. Perilaku yang dibentuk generasi “pendidikan otoriter” demikian banyak melahirkan pribadi yang terbelah tak seimbang, mengutip Abidin (2000), pendidikan seperti ini “*too much science too little faith*”, lebih banyak ilmu dengan tipisnya kepercayaan keyakinan agama.

Desentralisasi pendidikan, merupakan salah satu cara di masa “pendidikan otoriter” tidak lagi dianut, alias masa pendidikan di era otonomi daerah. Era yang dimulai secara formal melalui produk kebijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 di mana dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Implikasi otonomi daerah bagi sektor pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewenangan di

bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah disisi lain. Lalu sebuah sistem pendidikan nasional yang disahkan melalui UU Sisdiknas yang beberapa muatan dalam kebijakan ini secara tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu pendidikan.

Terkait hal tersenut Indonesia memilih demokrasi pelaksanaan pendidikan. Realita pergulatannya dalam wacana logika adalah jika reformasi 1998 juga belum dapat menentukan bagaimana model demokrasi yang cocok bagi Indonesia, apakah demokrasi memang tidak cocok bagi Indonesia?”. Terkait hal tersebut perlu ditekankan pada pemahaman yang memisahkan antara demokrasi sebagai sistem politik dengan demokrasi sebagai sebuah nilai. Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi, para warga negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam kehidupan personal maupun sosial. Selain itu, demokrasi juga adalah cara yang efektif untuk mengontrol kekuasaan

agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukkan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum. Hukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya.

Konsep yang ditumbuhkan dengan keadaan masyarakat Negara Indonesia saat ini memberi harapan di masa yang akan datang. Walaupun banyak yang skeptis bahwa masa depan politik di Indonesia akan menuju ke arah yang lebih baik. Namun perkembangan yang

terjadi belakangan ini dapat dijadikan setitik harapan bagi masa depan Indonesia. Yang perlu dicatat adalah jangan sampai kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja dan melupakan ketertinggalan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Masalah-masalah sosial yang secara jelas mengancam integrasi bangsa ini dan juga berbagai kasus kelaparan harulah cepat diselesaikan. Seiring dengan perbaikan sistem politik dan juga aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Konteks memasukkan nilai demokrasi dalam proses pendidikan perlu ada dalam sejarahnya, berdirinya RI tidak bisa dilepaskan oleh peran pemuda (pelajar). Ambil contoh, Sukarno, M. Hatta, M. Yamin, dan lain sebagainya. Peran para pemuda tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata, karena eksistensinya sangat diakui oleh dunia internasional. Dapat dibayangkan andai kata, bangsa ini tidak ada pelajar-pelajar tersebut, tidak mungkin berdiri NKRI.

Pada tahun 1965, pelajar (pemuda) juga punya peran yang sangat besar dalam pembubaran PKI yang berkehendak untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Begitu juga pada saat

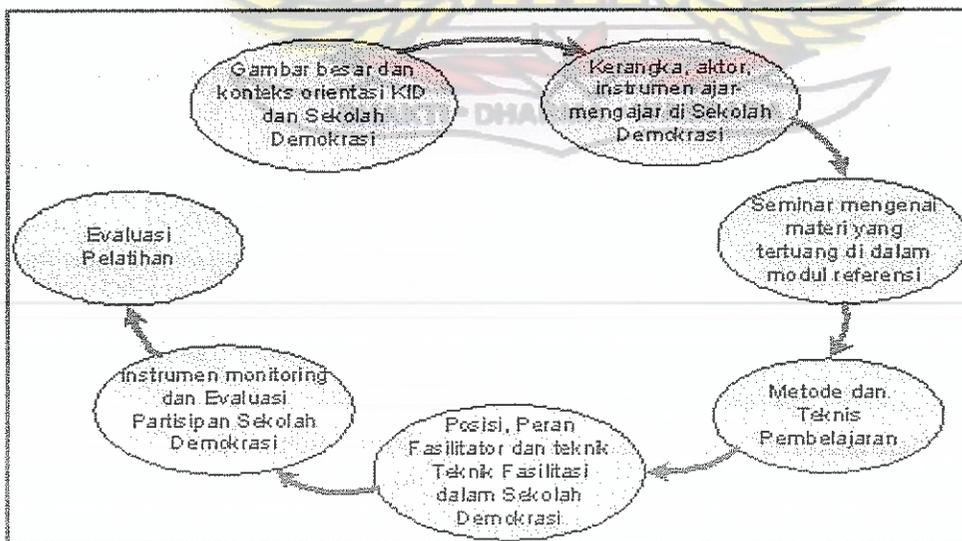
tumbangnya orde baru, pelajar juga sangat berperan besar.

Melihat kenyataan ini, pelajar begitu eksis dalam perjalanan bangsa ini. Tetapi, bagaimana dengan pelajar Indonesia sekarang? menjawab pertanyaan tersebut sangat sulit. Tetapi, sebuah keharusan sejarah, bahwa pelajar harus memberikan kontribusinya bagi bangsa ini. Sekecil apapun itu. Kemudian, memulainya dari mana? Tentunya, memulai untuk belajar demokrasi. Hanya dengan berdemokrasilah bangsa ini menjadi bangsa bermartabat. Dengan berdemokrasi juga, akan terjadi saling menghormati perbedaan di antara anak bangsa.

Sekolah Demokrasi adalah alternatif cerdas untuk membentuk

karakter dan waktak kebangsaan yang dibutuhkan saat ini untuk menghargai, menghormati, berprestasi untuk membangun bangsa pada konteks persatuan. Rintisan sekolah demokrasi sudah banyak dilakukan bahkan keberhasilan menjadi sangat menginspirasi generasi muda dalam menjalankan profesinya.

Kurikulum Sekolah demokrasi secara garis besar meliputi keterampilan memfasilitasi, konsep-teori pendidikan orang dewasa dan penguasaan instrumen monitoring dan evaluasi dalam proses belajar mengajar dengan lebih banyak memberikan pelatihan daripada teori. Alur pelatihan yang diberikan antara lain dalam bentuk seperti di bawah ini:



Alur Pelatihan

Sekolah Demokrasi diharapkan dapat mendorong demokrasi ke arah yang lebih maju dengan menggunakan berbagai cara yang memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara luas. Untuk itu, ada 4 (empat) pilar demokrasi yang perlu diperkuat, yaitu masyarakat sipil, masyarakat ekonomi (pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya), masyarakat politik (aktivis parpol dan politisi), serta pemerintah (birokrasi). Sekolah Demokrasi bukanlah ajang indoktrinasi. Sekolah Demokrasi adalah ajang untuk mendialogkan perspektif demokrasi berbasis narasi lokal dan narasi universal. Dengan demikian demokrasi bukan lagi menjadi sesuatu yang abstrak, namun menjadi suatu rumusan yang kontekstual sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### 1. Tujuan

Mendorong, mengembangkan, dan memperkuat konsolidasi demokrasi lokal melalui pintu simpul demokrasi di kalangan masyarakat sipil, masyarakat politik, negara, dan pasar.

### 2. Materi Sekolah Demokrasi

Materi diberikan di kelas sebagai media untuk “tahu” dan mendalami wacana demokrasi serta realitas yang selama ini berkembang. Artinya yang paling penting adalah keikutsertaan dan keaktifan para peserta dalam berdialog tentang demokrasi, bukan permasalahan administrasi dan struktural. Sehingga materi yang ada dan ditransformasikan dalam diskusi interaktif dan pelatihan antara lain:

- a. Analisis Sosial
- b. Konsep-konsep Demokrasi
- c. Politik dan Sistem Tata Pemerintahan
- d. Demokrasi, Pembangunan, dan Bisnis
- e. Gerakan Sosial
- f. Kebijakan Publik
- g. Resolusi Konflik
- h. Demokrasi dan Multikulturalisme
- i. Demokrasi, Hukum, dan HAM
- j. Anggaran Partisipatif
- k. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- l. Pembangunan dan Tata Ruang Wilayah
- m. Metodologi Riset
- n. Pengorganisasian dan Advokasi
- o. Metode dan Teknik Fasilitasi

## F. PROSES PENDIDIKAN DI AKADEMI KEPOLISIAN YANG IDEAL

Perjalanan Sejarah Akademi Kepolisian (Akp) yang panjang pada kronologis 10 April 1999: Berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan diinstruksikan kepada Presiden untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dalam bentuk pemisahan tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum. Atas dasar itu, keluarlah Instruksi Presiden No.2 tahun 99 sebagai langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI (ditetapkan tanggal 8 Maret 1999), ditindaklanjuti dengan keputusan Menhankam Pangab No.: Kep/05/P/III/1999 tanggal 1 April 1999 tentang pelimpahan wewenang pembinaan Polri dari Pangab ke Menhankam sebagai tindak lanjut, keluarlah Skep Kapolri No.Pol: Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri, maka sejak 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari AKMIL, AAL, AAU serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI.

Tanggal 24 April 2003: Sejalan dengan Pencanangan Akademi

Kepolisian sebagai Etalase Pendidikan Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, pada tanggal 24 Oktober 2003 bersamaan dengan acara Defile Senja yang pertama kali dilakukan untuk menandai selesainya Pendidikan Bhayangkara, diresmikan pula Penggunaan Logo Akademi Kepolisian yang baru dengan mengganti kata-kata "Atmawedana-Kretakarma-Aryawirya" dengan kata-kata "Dharma-Bijaksana-Ksatria" dan pita bertuliskan "Akademi Kepolisian" yang semula terpisah di bagian atas disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perisai Tri-Brata. Bersamaan dengan itu, tampilan Akademi Kepolisian telah berubah pula secara demikian signifikan memasuki paradigma baru tampilan Akademi Kepolisian sebagai Etalase Pendidikan Polri telah berhasil mengubah Akademi Kepolisian pada semua sisi, sehingga bisa menampilkan Akademi Kepolisian yang lebih mendekati keinginan masyarakat yaitu mencetak Perwira-Perwira Polri yang mampu melayani dan melindungi masyarakat.

Visi Akpol menjadi Lembaga Pendidikan Kedinasan Berwawasan Global, Berkualitas untuk Terwujudnya Perwira Polri Sebagai

*First Line Supervisor* dan Calon Pimpinan Polri Yang Memiliki/Menguasai dan Mampu Mengembangkan Taktik, Teknik dan Administrasi (Management Bin) Kepolisian serta Memadukan Pengetahuan dan Kecakapan Akademisi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Polri untuk Menciptakan Harkamtibmas. Misi-nya adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pengasuhan dan pelatihan yang berkualitas dalam rangka membentuk Perwira Polri yang memiliki kemampuan sebagai *First Line Supervisor*.

- a. Menyelenggarakan manajemen SDM Akpol yang transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menopang proses pendidikan Akpol.
- c. Menyelenggarakan penelitian dengan sasaran yang berhubungan dengan peningkatan profesi dan tugas pokok Kepolisian.
- d. Meningkatkan mutu latihan kerja taruna dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dengan titik berat materi pelaksanaan tugas pokok Polri bagi seorang *First Line Supervisor*.
- e. Menjalani kerja sama secara berkelanjutan dengan Akademi

TNI, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Kepolisian dalam maupun Luar Negeri.

- f. Menghasilkan lulusan yang menguasai teknik dan administrasi Kepolisian (Managemen Pembinaan) Dengan Memadukan Pengetahuan Akademis.
- g. Menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan teknik dan administrasi Kepolisian (Managemen Pembinaan) dengan memadukan pengetahuan akademis.

Kurikulum Akpol disusun berdasarkan pendekatan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan tujuan untuk membentuk taruna menjadi anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang profesional, modern, dan bermoral.

### 3. Profil Lulusan Pendidikan Pembentukan Akpol

Profil yang diluluskan disiapkan untuk Manajer Tingkat Pertama (*first line supervisor*) Tugas Umum Kepolisian yang Akademisi dan Praktisi dengan Kompetensi :

- a. mampu untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- b. mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas pokok kepolisian dalam rangka menangkal timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta penyakit masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan teknologi informasi.
- c. Kemampuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang didukung oleh kepribadian luhur, mental yang tangguh dan kesamaptaaan yang prima.

#### 4. Tujuan Pendidikan

Menciptakan lulusan Akademi Kepolisian untuk menjadi pimpinan Polri masa depan dengan kriteria:

- a. Sebagai Abdi Negara dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, arif, profesional,

patuh hukum, bersikap / berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran sesuai dengan etika profesi kepolisian.
- c. Mahir dalam melaksanakan tugas tugas Kepolisian secara proporsional.
- d. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas tugas dan fungsi kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum.
- e. Mampu memangku jabatan pada organisasi kepolisian di lini terdepan.

#### 5. Sasaran Pendidikan

- a. Proses pendidikan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi
- b. Sistem pembelajaran menunjuk kepada kurikulum berbasis kompetensi untuk mengembangkan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik.
- c. Sistem pelatihan menunjuk kepada kurikulum berbasis kompetensi untuk mengembangkan ketrampilan profesi dan kecakapan bertindak.

d. Sistem pengasuhan menunjuk kepada kurikulum berbasis kompetensi untuk membentuk sikap, mental, moral dan perilaku terpuji.

Pengkritisan terkait pola pendidikan di Akpol yang berbasis pada Pola Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan dalam mencapai kurikulumnya, maka menunjukkan aspek demokrasi kental di dalamnya baik empiris maupun formal. Artinya proses belajar mengajar baik di pengajaran, pelatihan, maupun pengasuhan harus berbasis pada nilai dasar demokrasi. Sehingga materi sekolah demokrasi sangat cair dan mampu mengalir pada proses tersebut.

Selanjutnya jika dikritisi materi sekolah demokrasi sebagian besar sudah masuk pada penyebaran mata kuliah yang sudah ada dan selama ini diajarkan baik secara formal dalam mata kuliah maupun secara informal dalam pelatihan dan pengasuhan. Konkritnya lima belas materi sekolah demokrasi secara tersurat dan tersirat di Akademi Kepolisian sudah ada antara lain: Analisis Sosial (masuk pada mata kuliah manajemen konflik), konsep-konsep Demokrasi, Politik dan Sistem Tata Pemerintahan (ada pada mata

kuliah pengembangan kepribadian, Hukum dan Politik) Demokrasi hukum dan HAM serta Metodologi penelitian sudah ada dengan mata kuliah yang sama. Barangkali yang perlu penekanan dan tidak harus menjadi mata kuliah adalah pemberian materi kuliah yang terkait dengan Pembangunan, dan Bisnis, Gerakan Sosial Kebijakan Publik, Resolusi Konflik, Demokrasi dan Multikulturalisme, Demokrasi, Hukum, dan HAM, Anggaran Partisipatif, Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Pembangunan dan Tata Ruang Wilayah, Pengorganisasian dan Advokasi, Metode dan Teknik Fasilitasi. Pemberian materi tersebut sebagai pengayaan pada mata kuliah yang punya kedekatan, sekaligus tidak harus melalui proses perkuliahan, bisa melalui studi seminar, workshop, pelatihan atau format lain yang sangat sesuai dengan keunikan Akademi Kepolisian.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa ketika banyak orang maupun institusi yang masih meragukan bahwa Akademi Kepolisian kurang mengajarkan konsep demokrasi adalah gugur. Artinya jauh lebih progres Akademi Kepolisian sudah menanamkan nilai dasar demokrasi. Masalahnya adalah perlu secara

empirik ditunjukkan pada profil lulusannya yang menunjukkan sikap dan perilaku yang demokratis.

Lalu seperti apa yang diharapkan demokratis tersebut? Barangkali agak naif jika menunjuk pada karakter tertentu, namun bisa menjadi rujukan minimal profil lulusan Akpol sebagai Manajer Tingkat Pertama (*first line supervisor*) yang menunjukkan sikap nyata dalam perilaku yang lebih:

1. Jujur. Seorang pemimpin yang baik menunjukkan ketulusan, integritas, dan keterbukaan dalam setiap tindakannya. Kejujuran merupakan sebuah kunci keberhasilan. Ketika seorang pemuda mencoba melakukan kebohongan, maka ia akan terus menerus melakukannya selama belum ketahuan. Dan sifat itu akan terbentuk dalam dirinya. Bayangkan, jika pemimpin Indonesia terdiri dari pemuda-pemuda yang berkarakter suka berbohong, maka bisa diperkirakan berapa besar kebohongan yang terjadi di pemerintahan dan berapa kerugian yang diperoleh dari kebohongan itu.
2. Kompeten. Tindakan seorang pemimpin haruslah berdasar pada penalaran dan prinsip

moral, bukannya menggunakan emosi kanak-kanak dalam mengambil suatu keputusan. Kompetensi yang dimiliki harus sesuai dengan wadah tempat ia menuangkan kompetensinya. Misalnya seorang pemimpin, ia harus tahu dahulu dasar-dasar kepemimpinan, bentuk dan cara-cara memimpin serta kompetensi pendukung lainnya.

3. Berpandangan ke depan dan menetapkan tujuan (*visioner*). Dalam menetapkan tujuan, seorang pemimpin perlu menanamkan pemikiran bahwa tujuan itu adalah milik bersama. Ia mengetahui apa yang diinginkannya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Biasanya ia menetapkan prioritas berdasarkan nilai dasarnya. Seorang pemimpin yang memiliki pandangan ke depan akan menelaah apakah tindakan yang dilakukannya akan berdampak baik bagi bangsa dan negara ke depannya. Dalam hal ini pemuda bisa belajar dari seorang tokoh yang terkenal yaitu George Washington, presiden pertama Amerika Serikat. Ia memimpin AS selama dua periode kepemimpinan, ketika untuk periode ketiga, ia menolak

tawaran dari masyarakat. Pada hal saat itu AS belum menentukan aturan tentang pembatasan masa jabatan seorang presiden. Bisa saja, Washington menerimanya, tetapi mengapa ditolak? Ternyata ia berpikir jauh ke depan. Ia sadar, jika ia menerima tawaran untuk menjadi presiden yang ketiga kalinya, maka hal ini akan menjadi presiden buruk bagi pemerintahan negaranya. Karena ia menyadari telah banyak cikal bakal yang cocok untuk menggantikan kepemimpinannya, dan mereka harus diberi kesempatan. Begitu juga layaknya pemuda Indonesia, harus selalu memiliki pandangan ke depan serta ada tujuan yang jelas.

4. Memberi inspirasi. Dalam mengerjakan setiap tugas, seorang pemimpin harus menunjukkan rasa percaya diri, ketahanan mental, fisik, dan spiritual. Dengan begitu, bawahan akan terdorong untuk mencapai yang lebih baik lagi. Dalam hal ini juga terkait dengan kesesuaian antara kata dan perbuatan. Misalnya ketika menyemangati bawahan untuk rajin bekerja

maka sebagai pemimpin harus memberi contoh dulu.

5. Cerdas. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemauan untuk terus membaca, belajar, dan mencari tugas-tugas yang menantang kemampuannya.
6. Berpikiran adil. Prasangka adalah musuh dari keadilan. Seorang pemimpin yang baik akan memperlakukan semua orang dengan adil. Ia menunjukkan empatinya dengan bersikap peka terhadap perasaan, nilai, minat, dan keberadaan orang lain. Begitu juga ketika pemuda memimpin bangsa ini, harus berlaku adil pada semua golongan. Jangan sampai seorang pemuda yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pembaharu dan pemberi kecerahan bagi masyarakat bawah, malah melupakan kalangan bawah.
7. Berpikiran luas. Pemimpin yang baik menyadari setiap perbedaan yang ada dalam ruang lingkup kepemimpinannya dan mau menerima segala perbedaan itu. Dengan pikirannya yang luas tersebut maka permasalahan yang ada pun bisa diatasi dengan berbagai sudut pandang. Bukan hanya dari pandangan

pemimpin saja tetapi juga dari kalangan masyarakat yang merasa dirugikan.

8. Berani. Seorang pemimpin yang baik selalu tekun dalam mencapai tujuan. Biasanya, meskipun sedang berada di bawah tekanan, ia tetap tenang dan menunjukkan rasa percaya diri. Ini merupakan ciri dari seorang pemuda. Pemuda memiliki idealisme yang murni, dinamis, kreatif, inovatif, dan memiliki energi yang besar bagi perubahan sosial. Idealisme yang dimaksud adalah hal-hal yang secara ideal mesti diperjuangkan oleh para pemuda, bukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan luas demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Pemuda akan selalu memperjuangkan idealisme yang dianutnya. Tak jarang ketika idealisme yang dianut mendapat tantangan maka ia akan maju di depan dengan bekal keberaniannya yang benar-benar patut dibanggakan tersebut.
9. Tegas. Pemuda tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik bila tidak tegas da-

lam mengambil keputusan tepat di saat yang tepat. Ketegasan ini juga perlu dalam bertindak, jangan sampai seorang pemuda ragu-ragu dan mengundur waktu dalam mengambil tindakan. Harus berani mengambil kemungkinan-kemungkinan yang akan diterima dari tindakan tersebut. Ketegasan itu juga berupa dalam memberikan hukuman kepada anggota pemerintahan dan masyarakat yang melanggar aturan.

10. Imajinatif. Inovasi dan kreativitas diperlukan dalam suatu kepemimpinan. Seorang pemimpin haruslah membuat perubahan tepat di saat yang tepat dalam pemikiran, rencana, dan metodenya. Selain itu, kreativitas sang pemimpin juga terlihat dengan memikirkan tujuan dan gagasan baru yang lebih baik, dan menemukan solusi baru dalam memecahkan masalah (Syamsuddin 2009).

## G. PENUTUP

Mencapai ideal pola pendidikan demokratis di Akademi Kepolisian adalah usaha yang tidak sederhana namun sangat kompleks, artinya tidak mudah tetapi jika ulet

dan sungguh-sungguh serta kerjasama *timwork* civitas akademika pasti bisa. Dituntut kurikulum yang bagus penuh dengan nilai dasar demokratis harus dioperasionalkan oleh dosen atau gadik, pengasuh serta aturan kedisiplinan yang mendukungnya. Tidak bermaksud menggurui, tetapi bisa dijadikan perenungan filosofi dewan pendidikan di Aichi-Jepang (Masae 2010) (1) *To respect life, building strong minds and bodies, and installing a zest for living*, (2) *To learn things on one's own and think careful, fostering the ability to act independently*, (3) *To Understand the importance of courtesy, self-dicipline and building a life filled with generosity and broad-mindedness*.

Pemegang peran strategis sangat ditentukan oleh gadik, dosen dan atau pengasuh sehingga ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar perenungan dalam menjalankan pola pendidikan di Akpol antara lain adalah ada beberapa sikap yang diharapkan untuk seorang "guru" yang dihormati: (1) mudah dimengerti dan dipahami, (2) keakraban dengan peserta didik, (3) ramah terhadap peserta didik, (4) objektif terhadap peserta didik, (4) kasih sayang dan penuh seman-

gat (bersemangat untuk mendidik), (5) berjiwa memimpin di kelas, (6) berpandangan jauh ke depan, (7) berpengalaman, (8) mengajarkan etika.

Konteks pola pendidikan dengan "guru" yang berkarakter tersebutlah yang sesungguhnya mengajarkan nilai-nilai demokratis, dengan seperti itu maka harapan Perwira Polisi sebagai *Manager First Line Supervisor* yang mempunyai jiwa demokrasi akan semakin lebih konkrit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S. 2000. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Bandung: FE Universitas Padjadjaran.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Akademi Kepolisian. *Web Akpol*. ( diunduh tanggal 4 Juni 2010)
- April Carter, 1985. *Otoritas dan Demokrasi*, CV Rajawali, Jakarta
- Budiono, 1998. *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Ter-*

- hadap Pendidikan*, Jakarta: Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Beentham, 1999. *Democracy and Human Rights*, Oxford: Polity Press.
- , Bracking, Kearton & Weir, 2002. *International IDEA Handbook and Democracy Assessment*, New York: Kluwer Law International.
- Bielcher, Josef. 2006. *Hermeneutika Kontemporer : Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*, (alih bahasa oleh Masmuni Mahatma). Penerbit Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta
- Burki, Shahid j., Guillermo E. Perry dan William E. Dillinger. 1999, *Beyond the Center: Decentralizing the State*, Washington DC: World Bank
- Dood, Lawrence. 1976. *Coalitions in Parliamentary Government*. (New Jersey: Princeton University Press.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.87-92, lihat pula Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia
- Jean Baechler. 1995. *Democracy an Analytical Survey*, USA: Unesco
- Lyman Tower Sargent. 1999. *Contemporary Political Ideologies*, (London: The Dorsey Press, 1984)
- Ki Supriyoko, "Rekonstruksi Landasan Pendidikan Nasional", dalam Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara, Jakarta: Penerbit KOMPAS
- Lebang, I. , 2003. *Idealisasi Tampilan Akademi Kepolisian menuju pada Etalase Pendidikan Polisi Profesional*. Semarang: Mabes Polri Akpol
- Masao, Miyake. 2010. *Teachers are the most wonderful lifework in having dramatic scenes with students* . International Seminar "National culture and Character education commemerating the 13 th anniversary of post graduate program Semarang State University. June 5, 2010. Nagoya University

- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali.
- Patrinus, Harry A. dan David L. Ariasingam. 1997. "Decentralization of Education: Demand-Side Financing", Washington DC: World Bank.
- Rofik Suhud, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 33
- Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Suryadi, Karim, "Demokratisasi Pendidikan Demokrasi", dalam Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara, Jakarta: Penerbit KOM-PAS, 1999
- Syamsuddin, Aziz. 2009. *23 Karakter Pemuda Pilihan*. Bandung: Karya Ilmu.

